

KASUS COVID NAIK

Walkot Tangerang Wacanakan Siswa Kelas 3-6 Belajar Online

TANGERANG (IM)- Kasus Covid-19 (Korona) di Kota Tangerang terus meningkat. Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah berencana menggelar pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara virtual bagi siswa kelas 3 hingga 6 SD. "TK, PAUD, dan SD kelas 1 dan 2 sementara tidak tatap muka dulu. Kemungkinan yang SD kelas 3 sampai 6 juga mau kita bikin virtual semua," kata Arief kepada wartawan, Selasa (25/1).

Arief menuturkan saat ini siswa kelas 3-6 SD di wilayahnya masih melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) kapasitas 50 persen. Dia mengatakan pembelajaran secara virtual bagi siswa SD akan dikaji besok. "Saat ini tatap mukanya kapasitas 50 persen. Tapi kemungkinan hari Rabu kita mau kaji lagi, mungkin mau kita kurangi lagi anak-anak ini. Yang SD-nya semua mau kita virtualin ini," tuturnya.

Arief menyampaikan pembelajaran virtual dipilih karena pertimbangan keamanan. Dia ingin anak-anak bisa terlindungi dari virus Korona. "Ya menjaga aja. Kan sekarang ada kenaikan kasus ya. Jadi, mungkin kita lihat supaya lebih aman aja. Kita lindungi anak-anak kita," ucapnya.

Menurutnya, situasi Covid saat ini bisa saja membuat level PPKM di Kota Tangerang naik. Politikus Partai Demokrat ini juga sedang meramu WFH (work from home) 50 persen di kantor pemerintah.

"Karena kita mengamati kasus hari ke hari nih. Belum ada tanda-tanda penurunan, masih naik terus. Mungkin naik juga sama (level PPKM). Karena kasusnya kelihatannya naik, kita juga kan bagian dari aglomerasi. Makanya kan sebenarnya kita sudah mulai meramu WFH 50 persen kantor pemerintahan," jelasnya.

Sebelumnya, Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Helmiati mengatakan mengurangi kapasitas kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah hingga 50 persen. Sebagai informasi, sekolah di Kota Tangerang sebelumnya menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) berkapasitas 100 persen.

Helmiati mengungkapkan, selain mengurangi kapasitas, durasi PTM berkurang. Mulai hari ini, durasi sekolah tatap muka maksimal dilaksanakan 3 jam. "Per hari ini semuanya 50 persen. Durasinya maksimal 3 jam terus apabila satu kelas dipakai dua rombel maka jeda waktunya minimal satu jam supaya didisinfektan dulu dan tidak terjadi berkerumun antara ortu yang menjemput dan yang mengantar," katanya, kepada wartawan, Senin (24/1).

Kemudian, untuk murid kelas 1 dan 2 diterapkan pembelajaran secara daring. Helmiati menjelaskan kebijakan itu diambil lantaran murid kelas 1 dan 2 dianggap masih terlalu dini memahami protokol kesehatan yang wajib diterapkan di sekolah. ■ pp

Ratasan Pengemudi Transportasi di Kota Tangerang Divaksin Booster

TANGERANG (IM)- Dinas Kesehatan Kota Tangerang memperluas sasaran penerima vaksinasi dosis tiga atau booster. Kali ini menasar sopir dan kernet transportasi massal di Terminal Pons Plawad, Cipondoh, Selasa (25/1). Selain awak bus dan angkutan konvensional, pengemudi ojek dan taksi online yang sehari-hari beroperasi melayani masyarakat Kota Tangerang juga diikutsertakan. Target penerima vaksin dosis tiga ini ada 600 sasaran.

Salah seorang ojek online (Ojol), Sudaryono mengaku telah melengkapinya suntik vaksin ketiga, karena dirinya merasa penting dalam menjaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19. "Apalagi saya sebagai kepala keluarga dan sehari-hari mencari nafkah dengan berinteraksi langsung dengan penumpang, jadi perlu pelindung diri," katanya.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya menyiapkan 600 dosis vaksin jenis Pfizer atau ada penambahan 200 dosis, karena melihat antisipasi awak transportasi massal. "Langkah tersebut sebagai percepatan vaksin booster dengan target 20.000 dosis dalam satu hari, sehingga masyarakat dapat cepat terlindungi dan aman serta nyaman beraktivitas.

Sejauh ini Dinkes Kota Tangerang telah menyuntikkan dosis tiga kepada 46.327

orang, dengan sasaran lansia, kelompok rentan, pelayan publik dan masyarakat umum. Selain memvaksinasi awak transportasi massal, Pemkot Tangerang juga berencana akan menghentikan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di sekolah mulai Rabu (26/1). Kebijakan penghentian dilakukan karena angka kasus harian penularan Covid-19 terus bertambah.

PTM terbatas untuk pendidikan tingkat PAUD dan TK telah dihentikan sejak Senin (24/1). Sedangkan untuk Sekolah Dasar (SD) kemungkinan dihentikan mulai Rabu. "Penghentian PTM berdasarkan masukan dari beberapa organisasi kedokteran. Namun keputusan final masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri," kata Arief.

Sedangkan pelaksanaan PTM untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih dilakukan kajian Dinas Pendidikan, apakah tetap dilanjutkan dengan kapasitas 50% atau dihentikan sepenuhnya. Berdasarkan data Dinkes Kota Tangerang hingga hari ini, angka kasus terkonfirmasi positif bertambah 118 kasus, sehingga total kasus aktif mencapai 885 kasus. Dari jumlah itu 34 pasien menjalani isolasi di rumah isolasi terkonsentrasi, sedangkan 111 pasien lain dirawat di rumah sakit alami gejala ringan hingga sedang. ■ pp



MENSOS TINJAU LOKASI BENCANA DI KABUPATEN PEKALONGAN

Menteri Sosial Tri Rismaharini (ketiga kiri) didampingi Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satria (kedua kanan) meninjau lokasi banjir di Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (25/1). Mensos meninjau lokasi pascabanjir bandang di Kedungwuni dan longsor di Petungkriyono serta memberikan bantuan logistik bencana, sembako, dan perlengkapan kebersihan kepada warga terdampak bencana.

Warga Cilenggang Tangsel Tuntut Pembangunan JPO di Tol Serbaraja

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), menjadi suatu kebutuhan yang mendesak terutama bagi akses warga. Pasalnya, semenjak tol itu dibangun, warga harus berputar dan menempuh jarak yang cukup jauh untuk sekadar beribadah ke musala dan sekolah.

TANGSEL (IM)- Warga RT 02/01 Kelurahan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan kembali melayangkan protes dengan membentangkan sejumlah spanduk di sisi proyek pembangunan Tol Serpong-Balaraja (Serbaraja). Aksi protes warga ini dilakukan untuk kedua kalinya lantaran tuntutan mereka kepada

pihak kontraktor, untuk segera dibuatkan jembatan penyeberangan orang (JPO) tidak juga dikabulkan.

Ketua RT02/01, Kelurahan Cilenggang, Neni Prihartini menuturkan, protes ini kembali dilayangkan karena permohonan warga tidak direalisasikan setelah berbulan-bulan lamanya.

"Sudah cukup lama. Mungkin ada sekitar empat bulan lalu," ujar Neni di lokasi, Selasa (25/1).

Hingga saat ini, tak ada tanggapan sama sekali dari pihak kontraktor. Padahal, ia telah mengumpulkan tanda tangan seluruh warganya untuk menguatkan tuntutannya tersebut.

Pertemuan terakhir, sempat dilakukan sebelum pihaknya melayangkan tuntutan untuk pertama kalinya.

"Waktu saya rapat, dari pihak pengelola itu jawabannya karena tidak ada tiang penyangga di tengah. Sedangkan ada jembatan yang dibangun tanpa tiang itu. Alasannya jarak di sini terlalu jauh. Kedua, kalau dibuatkan di sini untuk tangganya itu di tanah siapa," paparnya.

Lalu alasan ketiga, pihak kontraktor khawatir jika JPO dibangun nantinya akan banyak anak-anak yang melemparkan batu ke jalan.

"Menurut saya itu mah alasan yang tidak masuk akal. Nanti kan juga bisa pakai jarung," imbuhnya.

Ia menilai, JPO menjadi suatu kebutuhan yang mendesak terutama bagi akses warganya. Pasalnya, semenjak tol itu dibangun, warga harus berputar dan menempuh jarak yang cukup jauh untuk sekadar beribadah ke musala dan sekolah.

"Kita jadi misah sekarang, RT 02/01 dengan RT03/02. Untuk RT 02 ada 110 KK yang terdampak. Jadi kita mengajukan JPO agar ada jembatan. Cukup untuk nyebrang orang saja, yang penting mereka bisa

jalan ngaji, sekolah, atau kerja. Jadi enggak perlu memutar jauh," jelasnya.

Menurutnya, keterbatasan akses ini setidaknya juga turut berdampak pada perekonomian warga.

"Secara ekonomi juga mati, kasihan yang enggak punya kendaraan harus memutar. Kita biasanya jalan kaki. Mungkin bisa lebih dari dua kilometer," paparnya.

Melalui bentangan spanduk berisikan protes ini, ia berharap agar pihak kontraktor dapat mengembalikan tuntutannya itu.

Sementara itu di lokasi, sedikitnya terdapat enam spanduk yang dipasang warga. Seluruh spanduk permohonan itu, dipasang di tembok pinggir proyek pembangunan Tol. ■ pp

Pemkab Lebak Rehabilitasi 1.998 Unit Rumah tak Layak Huni

LEBAK (IM)- Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah merehabilitasi 1.998 unit rumah tidak layak huni di 28 kecamatan dalam tiga tahun terakhir. "Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," kata Kepala Dinas Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Lebak, Maman Suparman di Lebak, Selasa (25/1).

Puluhan ribu warga Kabupaten Lebak hingga kini masih menempati RTLH dan dipastikan jumlahnya terus bertambah akibat dampak pandemi. Pemerintah daerah sejak tiga tahun terakhir (2019-2021) di bawah kepemimpinan Bupati Iri Octavia telah merehabilitasi sebanyak 1.998 unit RTLH.

Masyarakat yang mendapatkan bantuan dana stimulan untuk rehabilitasi RTLH sebesar Rp15 juta per unit. Namun, dana bantuan dari APBD setempat diwajibkan adanya partisipasi masyarakat secara gotong royong. Sebab, kata dia, nilai dana stimulan tersebut tidak mencukupi untuk merehabilitasi RTLH tersebut. "Kami mengapresiasi semua warga yang menerima rehabilitasi RTLH yang teralisasi dengan memuassakan, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas kesehatan," katanya.

Menurut dia, pada tahun 2020 pemerintah daerah menggelontorkan dana Rp4,5 miliar untuk reha-

bilitasi sebanyak 300 unit RTLH dengan masing-masing menerima dana stimulan Rp15 juta.

Bantuan dana stimulan Rp15 juta itu untuk keperluan membeli kebutuhan material bangunan, namun diprioritaskan membeli material bangunan itu di lokasi terdekat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Adapun, persyaratan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana stimulan itu di antaranya berpenghasilan rendah, tanah hak milik, kondisi rumah berlantai tanah, tidak memiliki lantai, sanitasi hingga jendela. Setelah memenuhi persyaratan itu, kata dia, masyarakat yang menempati RTLH dapat mengajukan ke aparat desa dan kecamatan sampai kabupaten.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan verifikasi dengan melibatkan Dinas PUPR, Perkim dan konsultan. "Jika kondisi rumah mereka itu layak untuk direhabilitasi maka dapat direalisasikan pembangunannya," kata Maman.

Sementara itu, Jumardi, warga Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak mengaku lega setelah kondisi rumahnya layak huni dan tidak ketakutan roboh diterpa angin. Selain itu memiliki kamar mandi, cuci dan kakus (MCK) sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan," katanya.

Menurut dia, pada tahun 2020 pemerintah daerah menggelontorkan dana Rp4,5 miliar untuk reha-

Pedagang di Tangsel Belum Bisa Jual Minyak Goreng Rp 14 Ribu

TANGSEL (IM)- Sejumlah pedagang di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten mengaku belum mengetahui informasi pembelian kebijakan harga minyak goreng Rp 14 ribu per liter di pasar tradisional mulai, Rabu (26/1).

Pada Selasa (25/1), harga minyak goreng di Kota Tangsel masih berkisar di harga Rp 38 ribu per 2 liter atau Rp 19 ribu per liter. Pedagang mengatakan harga tersebut kemungkinan juga masih berlaku hingga beberapa hari ke depan.

Rizal, salah satu pedagang di Pasar Serpong, Tangsel mengatakan, belum memperoleh informasi mengenai penentuan harga Rp 14 ribu per liter yang diterapkan di Pasar Serpong. Hingga saat ini dia masih mengajukan minyak goreng dengan harga yang tinggi.

"Belum ada (informasi), kami masih jual Rp 38 ribu per 2 liter. Itu semua se-Pasar Serpong segitu, semenjak Tahun Baru harga tinggi sampai sekarang belum turun," ujar Rizal saat ditemui di Pasar Serpong, Selasa (25/1).

Rizal menuturkan, para pedagang akan tetap mematok harga tersebut karena stok

yang tersedia bermodal cukup tinggi, sehingga tidak mungkin dijual dengan harga Rp 14 ribu per liter. "Besok ya tetap jual Rp19 ribu per liter, tergantung modalnya, itu saja modalnya Rp 18.200. Harga segitu saja untungnya kecil, apalagi Rp 14 ribu per liter berapa rugi? Bukan lagi rugi malah, nggak bisa ngopi saya kalau jual segitu," ungkapnya, sambil terkekeh.

Namun, pria asal Aceh tersebut mengatakan bisa saja mengikuti aturan dari pemerintah dengan mematok harga minyak goreng Rp 14 ribu per liter, asal modalnya memang wajar melalui subsidi yang digelontorkan.

Dia pun berharap subsidi tersebut benar-benar teralisasi di pasar tradisional. Pasalnya, sejak harga minyak goreng melambung tinggi, pendapatannya mengalami penurunan karena pembeli mengurangi kuantitas pembelian. Terlebih dia menyebut terkena dampak dari harga minyak goreng di toko ritel modern yang sudah dipatok Rp 14 ribu per liter sejak pekan lalu.

Ditemui di lokasi yang sama, Pengawas Operasional Pasar Serpong, Budi Uripito

menyebutkan bahwa pihaknya belum ada informasi dari pihak Dinas Perdagangan (Disperindag) Tangsel untuk memberlakukan satu harga minyak goreng di Pasar Serpong. Namun, dia menyebut sempat ada rencana operasi pasar untuk minyak goreng, hanya tidak jadi teralisasi.

"Dari Disperindag kami belum dapat informasi. Cuma pernah Disperindag menawarkan ke kami mau ada operasi pasar minyak goreng, tetapi setelah rembungan ternyata di pedagang minyak goreng banyak, makanya dibatalkan," tuturnya.

Dengan belum adanya informasi penentuan satu harga minyak goreng Rp 14 ribu per liter, esok hari, Rabu (26/1), harganya di Pasar Serpong kemungkinan besar juga masih tinggi. Namun, Budi mengatakan pihaknya siap mengkoordinasikan jika Disperindag memberikan instruksi penentuan harga tersebut dan telah berkomunikasi dengan pemasok.

"Kalau ada intervensi dari pemerintah ya sangat baik, akan mempengaruhi harga pasar biar cepat normal, karena minyak (stoknya) banyak, kenapa harganya tinggi?," ujarnya. ■ pp

Tes Swab Siswa yang PTM di Bandung Nihil Kasus Positif

BANDUNG (IM)- Tes swab rapid antigen terhadap siswa dan guru yang mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Bandung masih nihil didapati kasus positif Covid-19 hingga Senin (24/1) sore. Total hingga kemarin jumlah sekolah yang diperiksa sebanyak 5 sekolah dari target 60 sekolah. "Jumlah sekolah yang sudah dilakukan pemeriksaan lima sekolah dari 60 sekolah sampai 24 Januari nanti," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, dr Ahyani Raksanagara, Selasa (25/1).

Ia mengatakan hasil tes swab rapid antigen menunjukkan kasus positif masih nihil sedangkan yang negatif sebanyak 220 orang siswa dan guru. Terdiri dari siswa 200 dan guru 20 orang. "Total 220 sampel, jenis pemeriksaan rapid antigen," katanya.

Ahyani menambahkan, satu dari enam orang warga Kota Bandung yang dinyatakan ter-

papar Omicron telah sembuh. Sedangkan lima orang lainnya masih menjalani isolasi mandiri di BPSDM Jawa Barat yang berada di Kota Cimahi.

"Situasinya mereka baik kok, dari awal memang tanpa gejala begitu," katanya.

Ia melanjutkan mereka tidak memiliki riwayat perjalanan luar negeri sehingga diduga berasal dari transmisi lokal. Setelah didapati warga yang terpapar Omicron, pihaknya melakukan isolasi terhadap mereka yang terpapar.

Selain itu, melakukan tracing kepada mereka yang melakukan kontak erat dengan warga terpapar Omicron sebanyak 95 orang. "Kalau hasil positif PCR nya sih sudah yang belum keluar kan hasil full sequencing ya karena bisa varian apapun. Jadi kalau yang positif itu ada lima orang dari yang diperiksa tapi variannya apa kan beda pemeriksaannya kita kirim ke labkes provinsi," katanya. ■ pur



MASKAPAI MULAI MEMINDAHKAN PESAWATNYA DARI BANDARA HALIM

Sebuah pesawat siap parkir setibanya dari Bandara Halim Perdanakusuma di Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (25/1). Sejumlah maskapai penerbangan seperti Travira Air, Pelita Air, Premi Air, Susi Air, Transwisata, Jhonlin dan Fasi akan melakukan aktivitas penerbangan melalui Bandara Pondok Cabe selama penutupan sementara Bandara Halim Perdanakusuma mulai Rabu (26/1).



PELESTARI KESENIAN BARONGSAI

Perajin Barongsai Dimas Sandi Ironi alias Liem Hauw Sian menyelesaikan pembuatan Barongsai di rumahnya, Magelang, Jawa Tengah Selasa (25/1). Dimas merupakan satu-satunya perajin sekaligus pelestari kesenian Barongsai berketurunan Tionghoa di Magelang yang karyanya tidak diperjualbelikan secara komersil melainkan hanya dijual untuk kepentingan pentas kelompok seni Barongsai.

Berencana Dihapus di 2023, Nasib 6.000 Honorer di Banten Terancam

SERANG (IM)- Rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pada 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), membuat nasib ribuan honorer di Banten terancam.

Sementara itu, seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejauh ini dinilai belum bisa menampung seluruh tenaga honorer karena keterbatasan formasi. Diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal menetapkan dua jenis pegawai pemerintah saja, yakni PNS dan PPPK. Pemerintah pun memberi kesempatan kepada tenaga honorer untuk mengikuti seleksi PNS atau PPPK.

Ketua Forum Pegawai Non-PNS Provinsi Banten (FPNPB), Taufik Hidayat mengatakan, dia beserta sekitar 6.000 honorer di Banten memiliki kekhawatiran yang sangat besar. Jika rencana Kemenpan-RB ini dilaksanakan, maka nasib rekan-rekan yang ada di kurang lebih 48 OPD akan terancam. Secara otomatis akan menjadi pengangguran baru di 2023. "Karena sampai saat ini Pemprov Banten tidak mengizinkan formasi honorer di luar tenaga pendidik untuk diangkat PNS atau PPPK. Padahal lokasi tersebut telah tersedia sejak 2021," kata Taufik, Selasa (25/1).

Oleh karenanya, dia meminta beberapa hal kepada Pemprov Banten. Pertama, FPNPB segera mengusulkan formasi, baik PNS maupun PPPK, untuk seluruh bagian yang bertugas di seluruh instansi. Kedua, rata-rata honorer telah bekerja 4 hingga 13 tahun lebih. Untuk itu, pihaknya meminta agar honorer yang ada di Banten menjadi prioritas pengangkatan. "Bila perlu tanpa melalui tes," katanya.

Permohonan ketiga, FPNPB berharap pemerintah tidak membuka atau meniadakan pembukaan CPNS atau calon PPPK untuk umum, mengingat honorer masih sangat banyak. Terlebih, dari faktor usia sangat tidak mungkin untuk bersaing dengan pelamar yang baru lulus mengenyam pendidikan. "Kami berharap kepada Pemprov Banten agar mendengar aspirasi kami karena ini menyangkut hajat hidup teman-teman honorer ke depan," tuturnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin mengatakan, bahwa penghapusan tenaga honorer mulai 2023 masih berupa wacana. Sebab, belum ada aturan lanjutan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. "Belum ada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pusat," ujarnya. ■ pra